

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pengamatan penulis dan pembahasan yang telah diuraikan dalam karya tulis ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan BMN berupa kendaraan dinas di Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum dalam 3 tahun terakhir DIPA satker Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Timur mengalami penurunan alokasi anggaran. Meskipun demikian, anggaran yang terserap selalu konsisten di atas 90% selama 3 tahun tersebut. Hal ini mengindikasikan kinerja anggaran pada satker Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Timur sudah cukup baik. Kinerja anggaran yang baik tentu mencerminkan telah berjalannya tugas dan fungsi satker sebagaimana mestinya. Anggaran belanja pemeliharaan BMN pada satker Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Timur, khususnya BMN berupa kendaraan dinas, relatif mengalami kenaikan alokasi selama 3 tahun terakhir. Fenomena tersebut cukup menarik, mengingat selama 3 tahun terakhir alokasi total pada DIPA satker Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Timur terus mengalami penurunan. Hal ini mencerminkan bahwa kebutuhan akan anggaran pemeliharaan BMN, khususnya BMN berupa

kendaraan dinas, memiliki urgensi yang cukup penting dan mendesak sehingga menjadi prioritas pada satker Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Timur. Di samping itu, dari sisi serapan anggaran, penyerapan anggaran belanja pemeliharaan BMN berupa kendaraan dinas juga konsisten di atas 90%. Bahkan pada kebanyakan detail belanja pemeliharaan kendaraan dinas hampir menyentuh 100% realisasi anggaran. Hal ini tentunya semakin menunjukkan urgensi yang sangat besar terhadap pemeliharaan BMN, terutama BMN berupa kendaraan dinas.

2. Berbagai kendala yang terjadi pada satker Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Timur secara umum relatif cukup sulit untuk dihindari. Pertama terkait dasar hukum, SBM merupakan bagian dari peraturan perundangan yang sudah menjadi ketetapan dan telah melalui penelitian dan analisis kebutuhan yang empiris. Kedua terkait ketersediaan *spare part* dan ATPM di kota satker yang bersangkutan atau bahkan di Indonesia, kendala ini tentu cukup memaksa satker untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada, terutama pada kendaraan dinas yang khusus/langka dan jauh melampaui masa manfaat/penggunaan reguler. Ketiga terkait ketersediaan anggaran, hal ini tentu harus menyesuaikan dengan kemampuan APBN sehingga satker harus memaksimalkan alokasi anggaran yang telah diberikan. Kendala-kendala tersebut tentunya cukup krusial bagi satker Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Timur karena intensitas kebutuhan dan operasional atas BMN berupa kendaraan dinas sangat tinggi sehingga memaksa satker mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia.

3. Satker Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Timur menerapkan berbagai strategi dalam pemeliharaan BMN berupa kendaraan dinas serta dalam mengantisipasi kendala-kendala yang terjadi. Optimalisasi kendaraan dinas dan sumber daya yang ada menjadi langkah strategis yang dilakukan oleh satker Satbrimob Polda Jatim dalam melakukan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satker. Dengan keterbatasan yang ada tentu dibutuhkan skala prioritas dalam pelaksanaan pemeliharaan BMN berupa kendaraan dinas. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tetap akan menghambat kinerja satker Satbrimob Polda Jatim sehingga dibutuhkan solusi untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Penghapusan BMN berupa kendaraan dinas yang sudah tidak layak jalan dan pengadaan kendaraan dinas baru menjadi solusi terbaik yang dibutuhkan oleh Satbrimob Polda Jatim. Namun hal tersebut tentu membutuhkan waktu lebih dan proses yang tidak instan.